

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai prosedur kenaikan pangkat pada sub bidang kenaikan pangkat dan layanan administrasi kepegawaian di BKD Provinsi Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prosedur kenaikan pangkat di BKD Provinsi Jawa Tengah adalah Kenaikan pangkat di BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Prosedur kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil berawal dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengusulkan Pegawai yang akan dinaikkan pangkatnya, Kemudian yang bersangkutan segera melengkapi syarat-syarat masing-masing rangkap 3 jika memenuhi persyaratan usulan tersebut akan di entri ke dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan) yang terhubung langsung dengan BKN pusat, lalu dikirimkan ke BKN Jogjakarta, BKN akan memverifikasi ulang usul tersebut. BKN Jogjakarta akan mengirimkan nota usul Kenaikan Pangkat kepada BKD, selanjutnya BKD akan membuat SK (Surat Keputusan) Kenaikan Pangkat dan meneliti ulang (pangkat terakhir, jabatan, gaji pokok lama, gaji pokok baru, dan masa kerja). Setelah itu SK Kenaikan Pangkat tersebut dikirimkan kepada Gubernur untuk mendapatkan tanda tangan dan dikembalikan lagi

kepada BKD untuk diberikan cap dan digandakan, untuk SK Kenaikan Pangkat yang asli akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan dan SK Kenaikan Pangkat salinan akan di simpan BKD sebagai arsip. Untuk Pangkat Golongan I/a – IV/b langsung dikirimkan ke BKN Yogyakarta, sedangkan Golongan Pangkat IV/c dan IV/e ke BKN Pusat Jakarta dan dari BKN surat keputusan Kenaikan Pangkat PNS akan turun.

Prosedur dalam Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas penginputan Kenaikan Pangkat kurang memadai, karena kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan tugas sesuai deadline yang harus dikerjakan. Pegawai di Sub Bidang Kenaikan Pangkat kurang efisien dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Perencanaan Sumber Daya Manusia meramalkan secara sistematis persediaan dan permintaan pegawai untuk waktu yang akan datang, seperti mendapatkan karyawan-karyawan baru atau melaksanakan program tindak nyata. Prosedur kenaikan pangkat seringkali terjadi masalah dan memerlukan waktu yang lama karena dalam pengumpulan berkas seringkali tidak lengkap dan menunggu untuk kelengkapan berkas untuk penginputan data secara lengkap.

## 4.2 Saran

Dari hasil penelitian tentang prosedur kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah maka peneliti memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah:

1. Guna mengurangi terjadinya kekurangan berkas pada saat pengiriman di BKD Bidang Kenaikan Pangkat harus lebih teliti dalam memeriksa berkas – berkas dari pemohon, agar proses kenaikan pangkat dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan tidak terjadi keterlambatan.
2. Lebih menegaskan kepada pemohon untuk melengkapi berkas yang diajukan agar tidak menunda kenaikan pangkat mereka.
3. Prosedur yang diterapkan sudah baik dan berjalan dengan semestinya. Hanya saja perlunya kesadaran dan kedisiplinan dan kerjasama yang baik agar proses ini berjalan dengan sesuai waktu yang telah ditetapkan dan tidak terjadi keterlambatan.
4. Tingginya beban kerja, mengakibatkan tertundanya usulan kenaikan pangkat pada tahapan proses berikutnya sehingga perlu kenaikan ditambah jumlah pegawai.